

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002 : 20).

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure*

atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2002 : 20).

Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa dkk, 2010).

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial Negara (Suwardjono, 2012 : 101). Dalam pelaporan keuangan, pemerintah mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus disampaikan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Lampiran II paragraf 32-37) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk menyajikan laporan keuangan yang memiliki kriteria relevan, laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Untuk itu pelaporan keuangan harus memenuhi unsur ketepatanwaktuan, sehingga informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Beberapa tinjauan tentang ketepatanwaktuan penyajian pelaporan keuangan daerah diketahui bahwa terdapat hal-hal yang mempengaruhi unsur tersebut, yaitu: sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal.

Kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem, untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien akan menunjukkan kinerja dari sumber daya manusia. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah, agar laporan keuangan tersebut tersaji tepat waktu (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi rangka penyebaran informasi. Hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) berhasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 (1) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 1 (2) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian Mirnayanti (2013) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan institusi yang pada gilirannya akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatanwaktuan juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan pimpinan dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey, Gordon, Narayanan dan Septiani, 2005 dalam Rosalin dan Kawedar , 2011).

Indriasari dan Nahartyo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Zuliarti (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Kudus. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah.

Mustafa, dkk. (2010) melakukan analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah Kota Kendari. Hasilnya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Dengan memperhatikan hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Zuliarti (2012), dan Mustafa dkk (2010), penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian tersebut. Akan tetapi penelitian ini akan dilakukan

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di wilayah Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2013, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di waktu dan wilayah yang berbeda.

Pentingnya ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengendalian internal terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
Dapat mengetahui seberapa penting sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peranan pengendalian internal akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, terutama yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
2. Bagi Masyarakat
Dapat digunakan untuk menambah wawasan masyarakat tentang pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan peranan

pengendalian internal akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, dan untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa mengenai ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dibagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: laporan keuangan daerah, pelaporan keuangan daerah, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, *definisi* operasional variabel, uji kualitas data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.